



LAPORAN

KINERJA

TAHUN

2018

BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

BPK

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dapat menyusun Laporan Kinerja BPK Perwakilan Jawa Barat Tahun 2018, yang merupakan laporan atas pencapaian kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat selama tahun 2018.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara dalam memenuhi kewajiban pertanggungjawabannya atas tugas pokok dan fungsi dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/ Lembaga dan (e) Unit kerja mandiri yang ditetapkan.

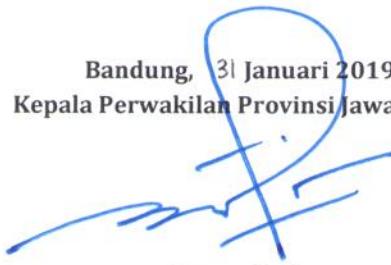
Pengukuran Kinerja Tahun 2018 dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang sudah ditetapkan dan di tandatangani pada tanggal 23 April 2018 di Jakarta. Dalam PK tersebut tercantum target-target Indikator Utama Kinerja (IKU) yang harus dicapai oleh Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam Tahun 2018.

Dalam pelaksanaannya, kami telah berusaha secara maksimal dengan memanfaatkan seluruh sumber daya, baik sumber daya manusia, keuangan serta sarana dan prasarana kerja untuk dapat melaksanakan seluruh kegiatan yang telah kami rencanakan guna mencapai target IKU yang telah ditetapkan.

Laporan Pencapaian kinerja ini diharapkan sudah menggambarkan kondisi real pencapaian kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis BPK dalam melaksanakan mandat dan amanat Undang-Undang yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dan dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun strategi yang tepat untuk merencanakan kegiatan dalam tahun berikutnya sehingga semua IKU yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan target.

Akhir kata, tugas BPK RI sebagai lembaga Negara yang mendapat mandat untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, hanya dapat dilaksanakan dengan mewujudkan BPK RI yang bebas, mandiri dan profesional. Selanjutnya Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari BPK RI yang tidak terpisahkan akan terus meningkatkan perannya dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara serta mewujudkan reformasi birokrasi yang berhasil guna.

Bandung, 31 Januari 2019
Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat



Arman Syifa
NIP. 19690404 199003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.....	1
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.....	3
D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.....	4
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA (PK) BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT	5
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.....	5
B. Perencanaan Operasional BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT (EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA)	20
A. Evaluasi atas Rencana Strategis (Renstra).....	20
B. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.....	20
C. Realisasi Anggaran.....	52
BAB IV PENUTUP.....	56
LAMPIRAN	

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK RI sebagaimana dinyatakan dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan (e) Unit kerja mandiri yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Tahun 2018 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat merupakan pertanggungjawaban kinerja dalam mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis 2016-2020 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada September 2016. Laporan Kinerja ini berisi pencapaian dan evaluasi atas sasaran strategis yang telah ditetapkan target kinerjanya dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 ini juga merupakan salah satu dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Auditorat Utama Keuangan Negara V Tahun 2018 dan Laporan Kinerja BPK RI Tahun 2018.

Penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengacu pada Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 431/K/X-III.2/9/2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pada Unit-Unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

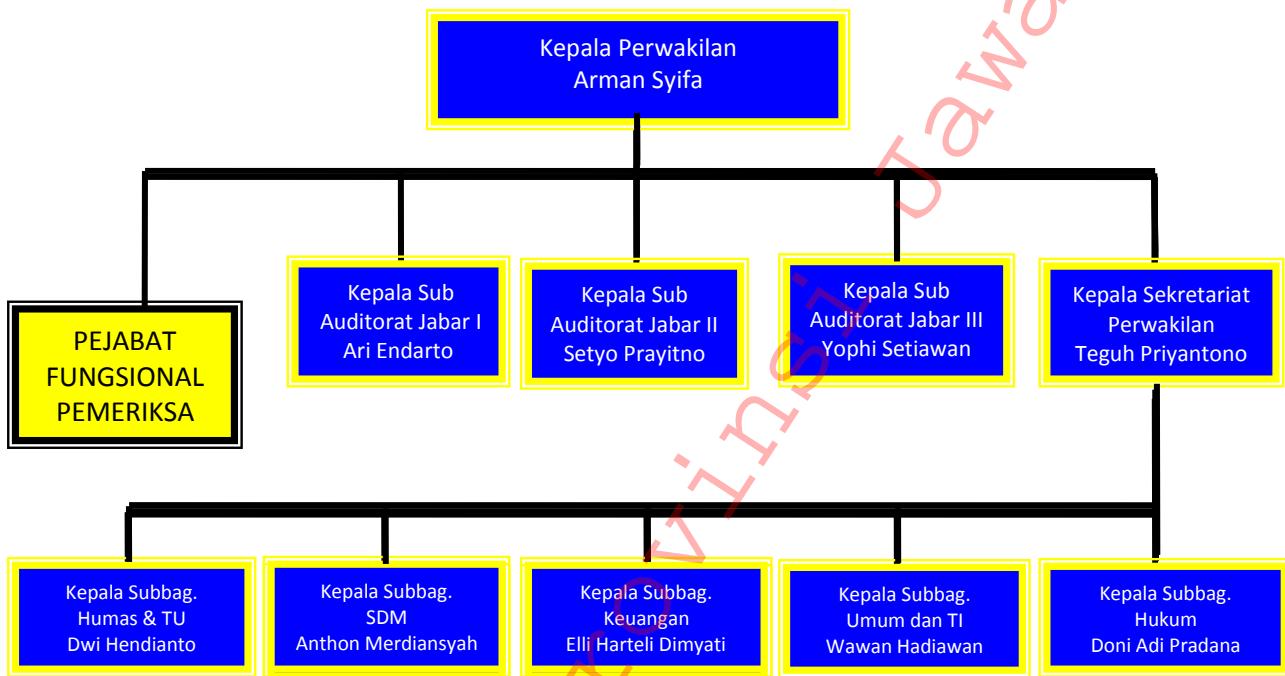
BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-III.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan BPK RI. Berdasarkan Keputusan tersebut, tugas BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh Auditorat Keuangan Negara (AKN).

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Jawa Barat dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Jawa Barat berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
4. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Jawa Barat;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh Pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan aparat pengawas internal pada entitas terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
13. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan laporan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
16. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, sarana dan prasarana, serta administrasi umum;

17. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
18. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat; dan
19. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. Struktur Organisasi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat



Gambar 1.1 – Struktur Organisasi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Sesuai dengan berdasarkan Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan BPK RI tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat terdiri dari:

1. Sub Auditorat Jawa Barat I

Sub Auditorat Jawa Barat I, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Bandung Barat serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

2. Sub Auditorat Jawa Barat II

Sub Auditorat Jawa Barat II, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Kuningan, Kabupaten

Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Sumedang, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

3. Sub Auditorat Jawa Barat III

Sub Auditorat Jawa Barat III, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

4. Sekretariat Perwakilan

Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Sekretariat Perwakilan membawahi Subbag Humas dan Tata Usaha, Subbag SDM, Subbag Keuangan, Subbag Umum dan Teknologi Informasi dan Subbag Hukum.

D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat per bulan Desember 2018 berjumlah 203 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Perwakilan, 3 orang Kepala Subauditorat, 1 orang Kepala Sekretariat Perwakilan, 5 orang Kepala Subbagian, 121 orang staf fungsional/teknis dan 21 orang staf penunjang pendukung. Pagu anggaran Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2018 sebesar Rp41.727.495.000,00 dengan perubahan Pagu Anggaran sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-2570/AG/2018 tanggal 12 November 2018 perihal Pengesahan Revisi Anggaran (Revisi VIII) BPK RI TA 2018, Pagu Anggaran TA 2018 menjadi Rp41.530.817.000,00 dengan realisasi sebesar Rp40.070.209.456,00 atau 96,48% dari total anggaran.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA (PK)

BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Dalam rangka memberikan hasil pemeriksaan yang lebih baik dengan fokus kepada pemenuhan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan, penyempurnaan proses bisnis utama, peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016 – 2020 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 399/K/X-XIII.2/9/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat tersebut mengacu kepada Renstra BPK RI yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPK RI Nomor 7/K/I-XIII.2/12/2015, tanggal 28 Desember 2015 dan Rencana Implementasi Renstra (RIR) Tahun 2016 – 2020 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 375/K/X-XIII.2/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 – 2020 memuat visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis BPK dalam melaksanakan mandat dan amanat Undang-Undang yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Visi : "Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

Misi :

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah secara bebas dan mandiri; dan
2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, terdapat 2 (dua) tujuan strategis yang akan dicapai pada akhir pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016 – 2020, yaitu:

1. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan negara;
2. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan negara.

Untuk mendukung tujuan strategis yang akan dicapai, maka BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menetapkan satu Sasaran Strategis (SS), yaitu:

SS 1 : Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan oleh Para Pemangku Kepentingan

Hal ini mendukung langsung pencapaian SS 1 Eselon I yaitu “Meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan”. Di mana pencapaian SS 1 tersebut berkontribusi terhadap pencapaian SS 1 Eselon I yang secara langsung mendukung pencapaian SS 1 BPK “Meningkatnya pemahaman hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan” dan SS 2 BPK “Meningkatnya kualitas sistem pengendalian mutu”.

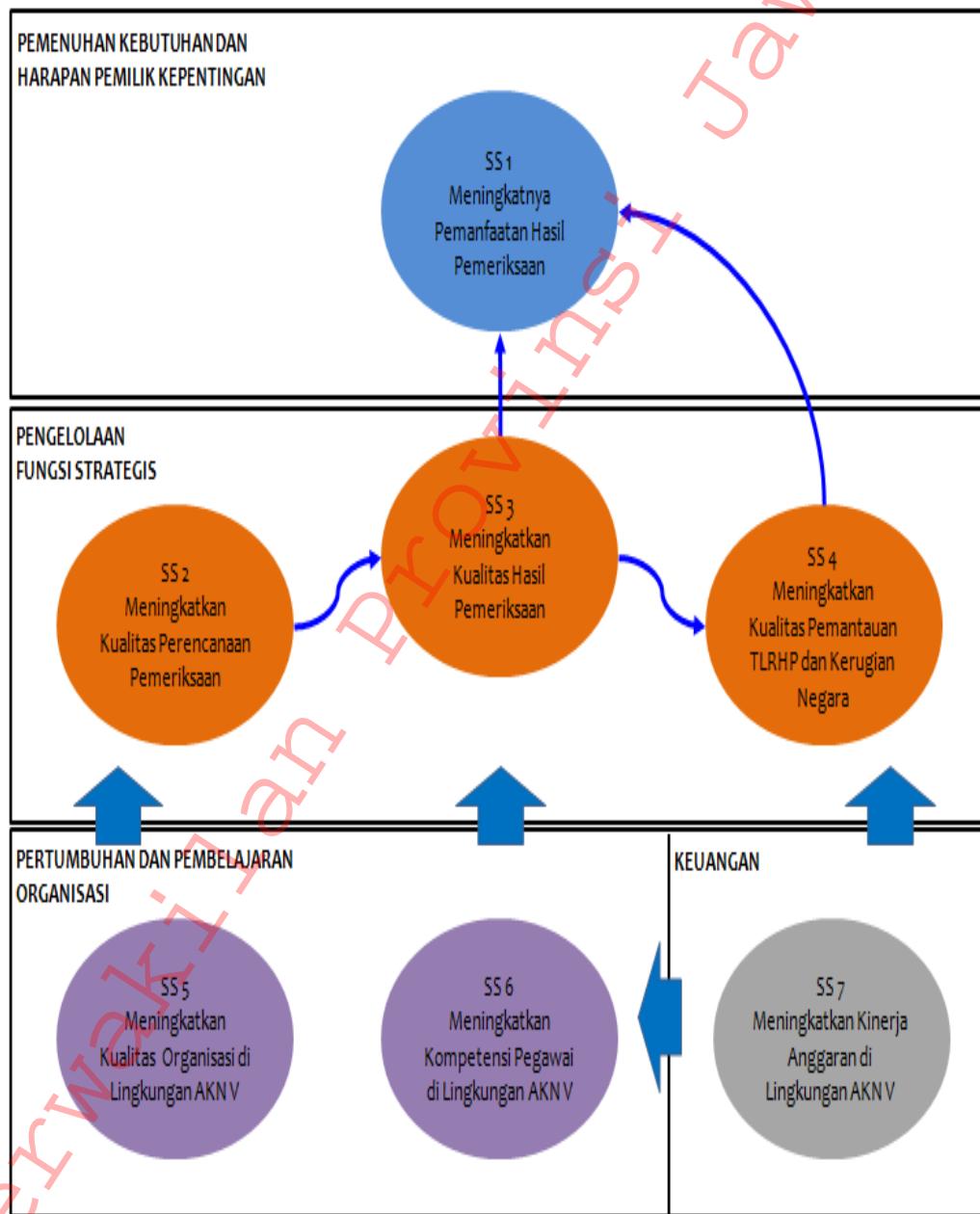
Hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenangnya. Di dalam Renstra 2016 – 2020, pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK digunakan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK menggambarkan arti penting keberadaan dan fungsi BPK bagi pemangku kepentingan.

Para pemangku kepentingan BPK terdiri dari lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD), pemerintah (instansi pemerintah yang diperiksa dan instansi yang berwenang/instansi penegak hukum, lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang), warga negara Indonesia, dan lainnya. Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas yang berbeda dan kepentingan yang berbeda dalam memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK. Para pemangku kepentingan dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu: (1) yang berpengaruh langsung terhadap keberadaan BPK, (2) yang terkait langsung dalam pelaksanaan tugas pokok BPK, dan (3) pemangku kepentingan lainnya.

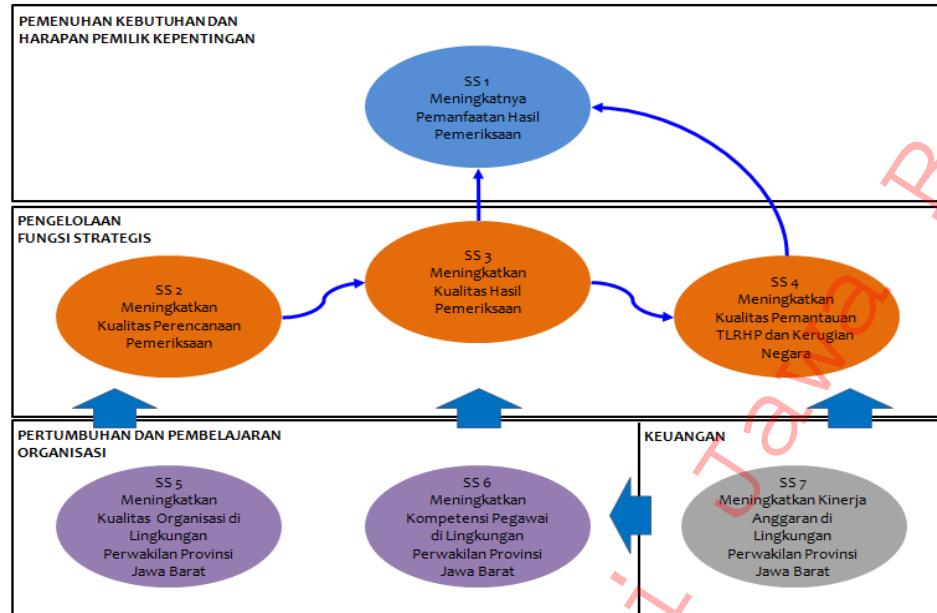
Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat ingin memastikan bahwa para pemangku kepentingan telah memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki tingkat efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, dalam kurun waktu lima tahun ke depan area penyempurnaan akan difokuskan pada proses pengelolaan strategi pemeriksaan dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini dinilai melalui survei

atas indeks kepuasan pemangku kepentingan, serta persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Sasaran Strategis BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat digambarkan dengan Peta Strategi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Peta strategis tersebut merupakan turunan dari Peta Strategi Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V dan pendukung pencapaian sasaran strategis AKN V. Berikut adalah Peta Strategi Auditorat Utama Keuangan Negara V dan Peta Strategi Perwakilan Provinsi Jawa Barat :



Gambar 2.1 – Peta Strategi Auditorat Utama Keuangan Negara V BPK



Gambar 2.2 – Peta Strategi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Dari Peta Strategi di atas, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat memiliki peranan dalam mewujudkan Sasaran Strategis BPK dengan menetapkan sembilan sasaran strategi pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah menyusun 26 (dua puluh enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus ditetapkan pencapaian targetnya sebagai berikut:

SS	Indikator Kinerja	
SS 1	1.1	Percentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
	1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksaan BPK
	1.3	Percentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH
	1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara
	1.5	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli
	1.6	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang
SS 2	2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan
	2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja seluruh LHP
	2.3	Ketetapan Waktu Penyampaian LHP

SS	Indikator Kinerja		
SS 3	3.1	Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan	
	3.2	Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	
	3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	
SS 4	4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	
	4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	
	4.3	Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	
SS 5	5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	
	5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	
	5.3	Persentase Penyusunan Best-Practice	
	5.4	Persentase Penyebaran Best-Practice	
	5.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	
	5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	
	5.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	
	5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	
SS 6	6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	
	6.2	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	
SS 7	7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	

Target Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Target pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) pada setiap tahunnya selama periode lima tahun. Berikut Sasaran Strategis, IKU dan target pencapaian IKU BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 – 2020, yaitu:

Tabel 2.1
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 – 2020

Sasaran Strategis	Nama IKU	Target IKU				
		2016	2017	2018	2019	2020
SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	65%	70%	75%	75%
	IKU 2. Indeks Kepuasan Auditée atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

Sasaran Strategis	Nama IKU	Target IKU				
		2016	2017	2018	2019	2020
SS 1. Meningkatkan Kualitas Pemantauan dan Pemeriksaan	IKU 3. Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 4. Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 5. Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 6. Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	2	2
SS 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 1. Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	85%	88%	90%	90%
	IKU 2. Rasio Jumlah LHP Kinerja seluruh LHP	15%	16%	17%	18%	20%
	IKU 3. Ketetapan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	100%
SS 3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IKU 1. Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 2. Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 3. Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	100%	100%	100%	100%
SS 4. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IKU 1. Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 2. Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56	56	56	56	56
	IKU 3. Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%
SS 5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 1. Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	A	A	A	A	A
	IKU 2. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 3. Jumlah Usulan Best-Practice	0	0	0	0	0
	IKU 4. Persentase Penyebaran Best-Practice	0%	0%	0%	0%	0%
	IKU 5. Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 6. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 7. Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2	2	2	2	2

Sasaran Strategis	Nama IKU	Target IKU				
		2016	2017	2018	2019	2020
	IKU 8. Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	95%	96%	96%	96%
SS 6. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 1. Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 2. Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	90%	90%	92%	93%
SS 7. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 1. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	80%	80%	85%	85%	90%

B. Perencanaan Operasional BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (d.h.i. Auditor Utama Keuangan Negara V) pada tanggal 23 April 2018. Berikut adalah IKU BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018, yaitu :

Tabel 2.2
Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2018
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Target
SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan		65%
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH		100%
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli		100%
	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang		1
Strategi 1.1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan		90%
	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP		20%
	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP		80%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
Strategi 1.2. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56
	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan Quality Control dan Quality Assurance Pemeriksaan	100%
	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,10
	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
	IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5,00
	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00
	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A
	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%
	IK 3.2.3	Jumlah Best Practice yang Disusun	1
	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan Best Practice	100%
	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%
	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%
	IK 3.2.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	3
Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%
	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%
Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	85%

Dalam rangka mencapai target kinerja Tahun 2018 yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menetapkan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2018, yang menetapkan target kinerja setiap triwulan selama satu tahun. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rencana Aksi Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target PK 2018	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SS 1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan							
IKU 1.1	Percentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%	61,23%	65%	65%	65%	Desember	Target TW 1 sesuai realiasasi TW 4 2017, TW selanjutnya sesuai Target Tahun 2018.
IKU 1.2	Percentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	IKU Bonus, sesuai target Tahun 2018 di setiap Triwulan.
IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	IKU Bonus, sesuai target Tahun 2018 di setiap Triwulan.
IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	0	0	0	1	Desember	Sesuai RKA Satker
Strategi 1.1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan							
IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90%	90%	90%	90%	90%	Desember	Sesuai target Tahun 2018 di setiap Triwulan.
IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	20%	0%	0%	0%	20%	Desember	Sesuai RKA Satker, RKP Tahun 2018 akan diterbitkan 9 LHP Kinerja
IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	80%	0%	0%	0%	80%	Desember	IKU Tahunan, Target pada TW 4
Strategi 1.2	Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara							
IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	0%	50%	50%	100%	Desember	Pada TW 1 belum ada realisasi, baru mulai pada TW 2
IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56	0	28	28	56	Desember	Sesuai RKA Satker
IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	0%	100%	100%	100%	Desember	IKU proses, targetnya didistribusi secara merata

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target PK 2018	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Strategi 2.1	Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan							
IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	0%	100%	100%	100%	Desember	IKU proses, targetnya didistribusi secara merata
IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,10	0	4,10	4,10	4,10	Desember	IKU proses, targetnya didistribusi secara merata
IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	0%	100%	100%	100%	Desember	IKU proses, targetnya didistribusi secara merata
IK 2.1.4	Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	IKU proses, targetnya didistribusi secara merata
Strategi 3.1	Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen, dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan							
IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar BPK	5,0	-	-	-	5,0	Desember	IKU Tahunan, Target pada TW 4
IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0	-	-	-	5,0	Desember	IKU Tahunan, Target pada TW 4
IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	IKU proses, targetnya didistribusi secara merata
Strategi 3.2	Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan							
IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	-	-	-	A	Desember	IKU Tahunan, Target pada TW 3
IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	80%	80%	80%	100%	Desember	IKU proses, targetnya didistribusi secara merata
IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	1	0	0	0	1	Desember	Sesuai RKA Satker
IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%	0	0	0	100%	Desember	Sesuai RKA Satker
IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	52%	68%	84%	100%	Desember	Sesuai Formula
IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	90%	90%	90%	90%	90%	Desember	IKU proses, targetnya didistribusi secara merata

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target PK 2018	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IK 3.2.7	Jumlah Media Relation yang dilaksanakan	3	0	1	1	3	Desember	Sesuai RKA Satker
Strategi 3.3	Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan							
IK 3.3.1	Percentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	25%	50%	75%	100%	Desember	Sesuai RKA Satker, untuk diklat diperwakilan akan dilaksanakan 3 Diklat, yaitu 2 Diklat Teknis Pemeriksaan dan 1 Diklat Non Pemeriksa
IK 3.3.2	Percentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	15%	45%	70%	100%	Desember	
Strategi 3.4	Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan							
IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	85%	85%	85%	85%	85%	Desember	IKU proses, targetnya didistribusi secara merata

Rencana kegiatan dalam Pencapaian Kinerja secara rinci sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama		Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP	Keterangan
IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	1. Pemantauan TLRHP pada Semester I 2018, dilaksanakan pada bulan Juli 2018 dengan Rapat PTLRHP bersama entitas di Kantor Perwakilan selama 3 hari. 2. Pemantauan TLRHP pada Semester II 2018, dilaksanakan pada bulan Desember 2018 dengan Rapat PTLRHP bersama entitas di Kantor Perwakilan selama 3 hari.	Menyesuaikan juga dengan penginputan dalam SiPTL
IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	Jika ada LHP yang mengandung unsur Pidana akan dikonsultasikan dan dikoordinasikan lebih dahulu dengan Auditor Utama Investigasi	IKU Bonus, sesuai target Tahun 2018 di setiap Triwulan.
IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	Jika ada Permintaan Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli akan dikoordinasikan dan dikonsultasikan lebih dahulu dengan Auditor Utama Investigasi dan dilakukan ekspos dengan Tim Pemeriksaan terkait	IKU Bonus, sesuai target Tahun 2018 di setiap Triwulan.
IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	Usulan Bahan Pendapat (UBP) disampaikan pada Semester TW III atau TW IV, direncanakan pada bulan Oktober 2018. Usulan dari setiap Subaud disampaikan pada bulan September 2018.	UBP terkait tema Pemeriksaan Kinerja lokal di Perwakilan

Indikator Kinerja Utama		Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP	Keterangan
IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	<p>Semester I:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan atas LKPD TA 2017 pada 28 entitas (Bulan Februari s.d. Mei 2018); 2. Pemeriksaan DTT atas LPJ Banparpol pada 28 entitas (setelah Pemeriksaan Pendahuluan/Interim LKPD). <p>Semester II:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Kinerja (Kinerja Tematik dan Kinerja lokal) pada 9 entitas. 2. Pemeriksaan DTT (Pemeriksaan Belanja) pada 8 entitas. 	
IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	Pemeriksaan Kinerja (Kinerja Tematik dan Kinerja lokal) pada 9 entitas akan dilaksanakan pada Semester II Tahun 2018, rencana LHP disampaikan pada bulan Desember 2018	
IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	<p>Semester I:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan atas LKPD TA 2017 pada 28 entitas (Bulan Februari s.d. Mei 2018); <p>Semester II:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Kinerja (Kinerja Tematik dan Kinerja lokal) pada 9 entitas. 2. Pemeriksaan DTT (Pemeriksaan Belanja) pada 8 entitas. 	
IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	<p>Pemantauan TLRHP pada Semester I 2018, dilaksanakan pada bulan Juli 2018 dengan Rapat PTLRHP bersama entitas di Kantor Perwakilan selama 3 hari.</p> <p>Pemantauan TLRHP pada Semester II 2018, dilaksanakan pada bulan Desember 2018 dengan Rapat PTLRHP bersama entitas di Kantor Perwakilan selama 3 hari.</p>	Menyesuaikan juga dengan penginputan dalam SiPTL
IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pada bulan Juli untuk 28 LHpt dan bulan Desember 2018 untuk 28 LHpt.	Menyesuaikan dengan jadwal penginputan dalam SIKAD
IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	Penyampaian laporan pemantauan pada bulan Juli dan pada bulan Desember 2018, untuk penginputan dalam SIKAD disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan EPP.	Menyesuaikan dengan jadwal penginputan dalam SIKAD
IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	<p>Dilaksanakan untuk seluruh kegiatan Pemeriksaan, yaitu:</p> <p>Semester I:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan atas LKPD TA 2017 pada 28 entitas (Bulan Februari s.d. Mei 2018); 2. Pemeriksaan DTT atas LPJ Banparpol pada 28 entitas (setelah Pemeriksaan Pendahuluan/Interim LKPD). 	

Indikator Kinerja Utama		Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP	Keterangan
		Semester II: 1. Pemeriksaan Kinerja (Kinerja Tematik dan Kinerja lokal) pada 9 entitas. 2. Pemeriksaan DTT (Pemeriksaan Belanja) pada 8 entitas.	
IK 2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	Penyebaran kuesioner kepada entitas dilakukan seb setelah kegiatan Pemeriksaan atau pada saat kegiatan pemeriksaan akan berakhir	Untuk seluruh kegiatan Pemeriksaan (kecuali DTT Banparpol)
IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	1. Penyampaian LHP LKPD TA 2017 paling lambat disampaikan 30 Mei 2018; 2. LHP LPJ Banparpol paling lambat disampaikan akhir Mei 2018 (tiga bulan sejak LPJ diterima BPK); 3. LHP Kinerja paling lambat disampaikan 21 Desember 2018; 4. LHP DTT paling lambat disampaikan akhir Januari 2019.	
IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	Diharapkan untuk tahun 2018 tidak ada LHP yang digugat baik oleh entitas ataupun oleh pihak lainnya.	
IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	Pelaksanaan dilakukan oleh Dit. PSMK melalui survey oleh pihak ketiga/surveychor	oleh Dit. PSMK
IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Pelaksanaan dilakukan oleh Dit. PSMK melalui survey oleh pihak ketiga/surveychor	oleh Dit. PSMK
IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	Laporan monitoring Hukuman Disiplin dilaksanakan setiap bulan	
IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	Hasil penilaian/evaluasi oleh Itama atas Laporan Kinerja, diterima satker pada bulan September	
IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	1. Pegawai memanfaatkan update data pribadi, cuti, kehadiran, dll data kepegawaian melalui SISDM. 2. Penggunaan email bpk.go.id untuk pelaksanaan tugas sehari-hari; 3. Penggunaan aplikasi SMP utk menginput ST Pemeriksaan, LHP, TLRHP dan LHPT Runeg; 4. Penggunaan aplikasi SiAP LK dan SiPTL; 5. Pemanfaatan Portal Perwakilan sebagai penyimpanan arsip LHP, DEP, TLRHP dan LHPT Runeg.	
IK 3.2.3	Jumlah Best Practice yang Disusun	Menyusun <i>best practice</i> yang sudah ada di Perwakilan sesuai format/pedoman yang telah ditetapkan dan akan disampaikan kepada Dit. PSMK sebagai usulan <i>best practice</i> .	

Indikator Kinerja Utama		Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP	Keterangan
IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	Melaksanakan implementasi/penerapan replikasi <i>best practice</i> Pemanfaatan Portal Perwakilan sebagai tempat penyimpanan arsip atau dokumen digital yang dapat diakses oleh pegawai perwakilan.	
IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Output akan disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya; 2. Laporan Kinerja akan disampaikan per Triwulan paling lambat tanggal 30/31 pada bulan berikutnya. 	
IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor; 2. Penyediaan Jasa Konsultan KAP untuk dan atas nama BPK pada LKPD TA 2017; 3. Pengadaan Peralatan dan Mesin; 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan AC/AHU; 5. Penyediaan Jasa Sewa Mesin Fotokopi; 6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Tata Suara Gedung dan CCTV; 7. Penyediaan Jasa Kebersihan Mess dan Rumah Dinas; 8. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Lift, Fire Alarm/Hydrant, Jaringan Telepon dan IT; 9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Generator Set (Genset). 	
IK 3.2.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan Press Release pada setiap kegiatan Penyerahan LHP baik di Semester I maupun di Semester II; 2. Melaksanakan BPK <i>Go To School</i> pada bulan Agustus/September 2018 di SMAN Kota Cimahi; 3. Melaksanakan Media Workshop pada bulan November 2018. 4. Melaksanakan TV <i>Talkshow</i> pada bulan Desember 2018 di TVRI. 	
IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	<p>Untuk memenuhi JP Pemeriksa, akan dilaksanakan 3 (tiga) Diklat Teknis Pemeriksaan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diklat Teknis dalam rangka persiapan LKPD pada bulan Januari atau Februari 2018; 2. Diklat Teknis (disesuaikan kebutuhan Pemeriksa atas usulan dari Subauditator) pada bulan Oktober 2018; 3. Diklat Teknis (disesuaikan kebutuhan Pemeriksa atas usulan dari Subauditator) pada bulan November atau Desember 2018 	Anggaran dari Badan Diklat
IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	<p>Untuk memenuhi JP Pegawai Non Pemeriksa, akan dilaksanakan 1 (satu) Diklat Teknis, yaitu:</p> <p>Diklat Kesekretariatan pada bulan September atau Oktober 2018;</p>	Anggaran dari Badan Diklat

Indikator Kinerja Utama	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP	Keterangan
IK 3.4.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dokumen penganggaran dan pemantau pada setiap bulan; 2. Menyusun dokumen pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pada setiap bulan; 3. Menyusun laporan keuangan tahunan; 4. Menyusun laporan kegiatan pelaksana pada setiap bulan; 5. Menyusun laporan realisasi DIPA, laporan Target Penyelesaian Keluaran, dan laporan KemajuanPaket Pengadaan pada setiap bulan. 	

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA** **(EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA)**

A. Evaluasi atas Rencana Strategis (Renstra)

Dalam kurun waktu selama 3 (tiga) tahun, tahun 2016 s.d. tahun 2018 banyak perubahan terhadap Perjanjian Kinerja Satker berupa penambahan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Perubahan penambahan IKU ini merupakan format/bentuk (*template*) IKU yang diberikan oleh Dit. PSMK kepada seluruh satker Perwakilan.

Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat memandang perlu dilakukannya perubahan/revisi atas Renstra Satker tidak hanya untuk Perwakilan Jawa Barat, namun juga untuk seluruh satker agar dilakukan perubahan/revisi atas Renstra. Perubahan atas Renstra dimaksudkan agar Renstra yang sudah ada dapat mengakomodir dan sejalan dengan perkembangan dan perubahan pada Perjanjian Kinerja BPK secara keseluruhan.

B. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Capaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 berdasarkan hasil validasi Triwulan IV (semester II) Tahun 2018 adalah 97,70. Skor kinerja Tahun 2018 ini menunjukkan penurunan skor sebanyak 1,33 poin jika dibandingkan skor Tahun 2017 sebesar 99,03. Penurunan skor kinerja ini terutama disebabkan karena:

1. sebanyak 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 15 (lima belas) Indikator Kinerja (IK) mencapai atau melebihi target yang ditentukan dengan skor kinerja 100 s.d. 105;
2. sebanyak 7 (tujuh) IK dengan skor <100 (76,60 s.d. 98,65);
3. terdapat satu IK (IK 3.2.3) yang tidak tercapai realisasinya atau skor 0;

Skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Skor
IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%	68,50%	105
IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100
IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	102%	102

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Skor
IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	100
IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90%	100%	105
IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	20%	21,74%	105
IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	80%	100%	105
IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100
IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56	56	100
IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	91,07%	91,07
IK 2.1.1	Pemenuhan Quality Control dan Quality Assurance Pemeriksaan	100%	100%	100
IK 2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,10	4,40	105
IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	98,65%	98,65
IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%	100%	100
IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5,00	3,83	76,6
IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,47	89,4
IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100
IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	BB	88,89
IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	82,68%	103,36
IK 3.2.3	Jumlah Best Practice yang Disusun	1	0	0
IK 3.2.4	Tingkat Penerapan Best Practice	100%	100%	100
IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%	100
IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	96,65	101,73
IK 3.2.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	3	3,90	105
IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	89,26	89,26

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Skor
IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	100%	100
IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	85%	82,76	97,36

Capaian tersebut walaupun ada penurunan namun tidak terlepas dari upaya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang tetap konsisten dalam memperbaiki kinerjanya melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

Adapun uraian lebih rinci mengenai pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk semua sasaran strategis sebagai berikut:

SS.1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

Sasaran Strategis ini diukur dengan empat IKU, yaitu IKU 1.1 - Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, IKU 1.2 - Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH, IKU 1.3 - Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli, dan IKU 1.4 - Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang.

1. IKU 1.1 - Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan.

Rekomendasi atas temuan-temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti merupakan salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran BPK RI dalam mendorong pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

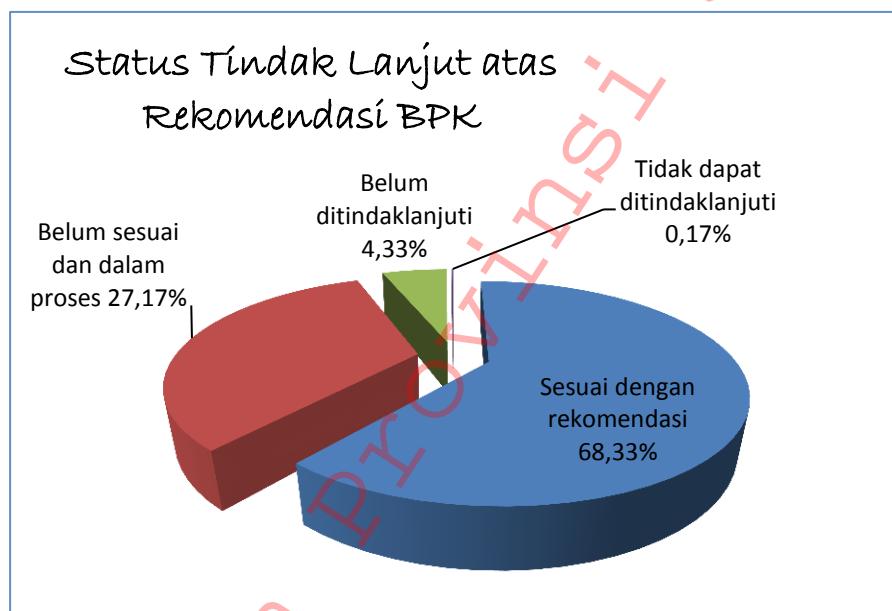
IKU ini bertujuan untuk mendorong pelaksana BPK untuk merumuskan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh entitas dan memberikan peningkatan pada operasional atau kinerja yang menggambarkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan.

Pengukuran atas IKU ini adalah persentase jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti dan yang tidak dapat ditindaklanjuti menurut peraturan yang berlaku dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke entitas dari seluruh hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu selama lima tahun terakhir.

Tabel 3.2. Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti

No.	Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK	Jumlah	Persentase (%)
1	Sesuai dengan rekomendasi	6.090	68,33%
2	Belum sesuai dan dalam proses	2.421	27,17%
3	Belum ditindaklanjuti	386	4,33%
4	Tidak dapat ditindaklanjuti	15	0,17%
	Jumlah Rekomendasi yang disampaikan	8.912	100,00%

Gambar 3.1. Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK



Pencapaian atas IKU 1.1 - Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan untuk tahun 2018 mencapai 68,50% dari 65% target yang ditetapkan dengan skor 105.

Perkembangan capaian IKU 1.1 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian IKU 1.1 – Tahun 2016, 2017 dan 2018

IKU	Uraian	Target IKU			Realisasi dan Skor Capaian IKU		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	65%	65%	60,17% dan 100,29	61,23% dan 94,20	68,50% dan 105

Capaian penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun 2018 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017, yaitu sebesar 68,50%. Peningkatan capaian tersebut disebabkan, oleh karena di tahun 2018, jajaran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat melakukan upaya-upaya perbaikan dan upaya persuasif kepada masing-masing Kepala Daerah, antara lain melalui kegiatan pembahasan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan pada setiap semester dengan mengundang Pemerintah Daerah dan Inspektorat Daerah di wilayah Jawa Barat ke Kantor Perwakilan serta beberapa upaya perbaikan melalui pihak Inspektorat Daerah.

Sementara itu, perbandingan realisasi tahun 2018 terhadap realisasi kinerja tiga tahun terakhir dan Target Kinerja lima tahunan terakhir sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 dan disesuaikan dengan target adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018
1.1. Persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan	60%	65%	70% disesuaikan dgn target seluruh BPK menjadi 65%	75%	75%	60,17%	61,23%	68,50%

2. IKU 1.2 – Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mandat tersebut mengisyaratkan peran BPK yaitu pada pelaporan indikasi tindak pidana yang ditemukan dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Untuk tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat belum ada penyampaian LHP yang mengandung unsur pidana kepada Instansi Penegak Hukum (IPH).

Perkembangan capaian IKU 1.2 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian IKU 1.2 – Tahun 2016, 2017 dan 2018

IKU	Uraian	Target IKU			Realisasi dan Skor Capaian IKU		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100 dan 100	100 dan 100	100 dan 100

Meskipun capaian IKU 1.2 pada tahun 2018 adalah 100%, walaupun tidak ada penyampaian LHP yang mengandung unsur Tindak Pidana ke IPH selama kurun waktu 2018, tetapi IKU ini merupakan IKU bonus. Artinya tidak tercapainya target IKU ini tidak akan berdampak pada pengurangan skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Perbandingan realisasi tahun 2018 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018
1.2. Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3. IKU 1.3 – Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tersebut mewajibkan BPK untuk melakukan penghitungan jumlah kerugian negara. Selama tahun 2018, tidak Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara (LHP PKN) yang diterbitkan, oleh karena terhadap permintaan PKN sejak tahun 2018 sudah dialihkan atau harus disampaikan melalui unit Auditorat Investigasi yang berada di Kantor Pusat. Kewenangan dipenuhi atau tidaknya permintaan PKN adalah kewenangan dari unit Auditorat Investigasi, BPK Perwakilan hanya menyampaikan dan melaporkan permintaan PKN tersebut ke unit Auditorat Investigasi.

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan bahwa BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah. Pemberian keterangan ahli ini diberikan berdasarkan LHP BPK dan dilakukan dalam rangka mendukung pemberantasan praktik korupsi atas keuangan negara.

Untuk tahun 2018, terdapat 2 (dua) permintaan Pemberian Keterangan Ahli oleh Pengadilan maupun APH yang dapat dipenuhi oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Perkembangan capaian IKU 1.3 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian IKU 1.3 – Tahun 2016, 2017 dan 2018

IKU	Uraian	Target IKU			Realisasi dan Skor Capaian IKU		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara	100%	100%	100%	102% dan 102	101% dan 101	102% dan 102
	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100% dan 100	103% dan 103	

IKU 1.3 ini merupakan IKU bonus, artinya apabila target pada IKU ini tidak tercapai maka tidak akan berdampak pada pengurangan skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, sedangkan apabila tercapai dan melebihi target akan menambah skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Sampai dengan Desember 2018 realisasi atas IKU ini mencapai 102%, yang melebihi target PK Tahun 2018.

Perbandingan realisasi tahun 2018 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018
1.3. Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%	102%	101%	102%

4. IKU 1.4 – Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang

Pemberian pendapat merupakan salah satu kewenangan BPK yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 bahwa BPK dapat memberikan pendapat kepada para pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.

Pendapat BPK RI adalah pendapat yang diberikan oleh BPK RI kepada Pemerintah Pusat/Daerah, DPD, DPRD, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD dan lembaga atau badan lain yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Pendapat BPK RI dapat mencakup antara lain perbaikan di bidang pendapatan, pengeluaran, pinjaman, penyertaan modal pemerintah, penjaminan pemerintah dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan BPK dalam memberikan pendapat, maka seluruh satker pemeriksaan termasuk Perwakilan Provinsi Jawa Barat di dorong untuk memberikan masukan kepada Ditama Revbang.

Selama tahun 2018 terdapat satu usulan bahan pendapat dari Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang telah disetujui dan dimanfaatkan oleh Ditama Revbang, yaitu: "Ketiadaan Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Karena Kadaluwarsa Dapat Menimbulkan Ketidakseragaman Perlakuan Penghapusan Piutang Pajak Daerah". Pencapaian tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga pencapaian untuk IKU 1.4. ini adalah 1 dengan skor 100. Perkembangan capaian IKU 1.4 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian IKU 1.4 – Tahun 2016, 2017 dan 2018

IKU	Uraian	Target IKU			Realisasi dan Skor Capaian IKU		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	1 dan 100	1 dan 100	1 dan 100

Perbandingan realisasi IKU 1.4 pada tahun 2018 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018
1.4. Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	2	2	1	1	1

Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

Strategi ini diukur dengan tiga IK, yaitu IK 1.1.1 - Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan, 1.1.2 - Rasio Jumlah LHP Kinerja seluruh LHP dan 1.1.3 – Tingkat Evaluasi LHP.

1. IK 1.1.1 – Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan

IK 1.1.1. ini mengukur kualitas perencanaan yang ditunjukkan dari kesesuaian rencana pemeriksaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) dan Rencana Strategis (Renstra) dan kesesuaian antara *Audit Objective* (AO) dan *Tentative Strategic Audit Objective* (TSAO).

Tahun 2018 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat melaksanakan pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan atas LKPD TA 2017 pada 28 entitas;
2. Pemeriksaan atas LPJ Banparpol pada 28 entitas;
3. Pemeriksaan Kinerja, yang terdiri dari:
 - a. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa, pada 4 entitas;
 - b. Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik, pada 3 entitas;
 - c. Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan PBB P2, pada 3 entitas.
4. Pemeriksaan DTT (Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur) pada 8 entitas.

IK ini merupakan IKU baru di Tahun 2018, menggantikan IKU 2.1. Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan. Pencapaian IK ini adalah 100% melebihi target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 90%. Dengan skor IK: 105

Perkembangan capaian IK 1.1.1 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian IK 1.1.1 – Tahun 2016, 2017 dan 2018

IKU	Uraian	Target IKU			Realisasi dan Skor Capaian IKU		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	85%	85%	90%	85% dan 100	95% dan 105	100% dan 105

Perbandingan realisasi IK 1.1.1 pada tahun 2018 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018
1.1.1. Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	85%	85%	90%	90%	90%	85%	95%	100%

2. IK 1.1.2 – Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP

Pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh BPK RI merupakan rangkaian proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif dengan harapan dapat melakukan penilaian secara independen atas aspek ekonomi dan efisiensi operasi serta aspek efektivitas (3E) dalam pencapaian hasil yang diinginkan.

Tujuan IK 1.1.2 ini adalah untuk meningkatkan peran serta BPK dalam mewujudkan *good governance* melalui peningkatan pelaksanaan pemeriksaan kinerja.

Realisasi Jumlah LHP Kinerja yang diterbitkan dalam Tahun 2018 mencapai 10 LHP dari seluruh jumlah LHP yang diterbit selama tahun 2018 yaitu sebanyak 46 LHP (non Banpol dan PKN).

Pencapaian IK ini adalah 21,74% melebihi target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 20%. Dengan skor IK: 105. Hal ini terjadi dikarenakan penambahan 1 Obyek Pemeriksaan Kinerja, yang sebelumnya ditargetkan 9 Obyek Pemeriksaan, menjadi 10 Obyek Pemeriksaan Kinerja, tanpa menambah/merubah anggaran dalam RKP. Sehingga output yang dihasilkan menjadi 10 LHP.

Gambar 3.2. Pemeriksaan yang dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018



Perkembangan capaian IK 1.1.2 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Perbandingan Capaian IK 1.1.2 – Tahun 2016, 2017 dan 2018

IKU	Uraian	Target IKU			Realisasi dan Skor Capaian IKU		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP	22%	17%	20%	22,50% dan 102,30	17,39% dan 102,29	21,74% dan 105

Perbandingan realisasi IK 1.1.2 pada tahun 2018 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018
1.1.2. Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP	15% menjadi 22% (karena ada revisi output RKP)	16% Menjadi 17% (karena ada revisi output RKP)	17% menjadi 20% (menyesuaikan dengan RKP)	18%	20%	22,50 %	17,39 %	21,74 %

3. IK 1.1.3 – Tingkat Evaluasi LHP

IK 1.1.3. ini mengukur analisis implementasi strategi pemeriksaan dari kesesuaian antara simpulan dalam LHP Kinerja dan LHP DTT dengan *Tentative Strategic Audit Objective* (TSAO). Pengukuran dan analisis dilakukan oleh Dit. PSMK.

IK ini merupakan IKU yang baru dan menggantikan IKU 3.3. Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP yang sebelumnya ada di PK Tahun 2016 dan PK Tahun 2017. Pencapaian IK ini adalah 100% melebihi target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 80%. Dengan skor IK: 105.

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian IK 1.1.3 – Tahun 2016, 2017 dan 2018

IKU	Uraian	Target IKU			Realisasi dan Skor Capaian IKU		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	N/A	N/A	80%	N/A	N/A	100% dan 105

Perbandingan realisasi IK 1.1.3 pada tahun 2018 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018
1.1.3. Tingkat Evaluasi LHP	N/A	N/A	80%	80%	80%	N/A	N/A	100%

Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

Strategi ini diukur dengan tiga IKU, yaitu IK 1.2.1 – Tingkat Kemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, IK 1.2.2 - Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara, dan IK 1.2.3 - Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang.

1. IK 1.2.1 – Tingkat Kemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

IK ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat terperiksa. Pemutakhiran ini akan direkapitulasi untuk digunakan sebagai salah satu bahan dalam penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS).

Pencapaian IK ini dalam Tahun 2018 adalah 100% atau sesuai target yang ditetapkan sebesar 100% dengan skor 100.

Perkembangan capaian IK 1.2.1 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian IK 1.2.1 – Tahun 2016, 2017 dan 2018

IKU	Uraian	Target IKU			Realisasi dan Skor Capaian IKU		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1.2.1	Tingkat Kemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100% dan 100	100% dan 100	100% dan 100

Perbandingan realisasi IK 1.2.1 pada tahun 2018 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018
1.2.1 Tingkat Kemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2. IK 1.2.2 – Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

Laporan pemantauan mencakup jumlah kasus kerugian negara yang telah ditetapkan dan jumlah kasus yang telah diselesaikan dalam satu periode laporan. IKU 1.1.2 bertujuan untuk mendorong Perwakilan dalam melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara sehingga efektivitas penyelesaian ganti kerugian negara baik dari sisi jangka waktu penyelesaian maupun besaran ganti rugi dapat tercapai.

Jumlah laporan pemantauan penyelesaian ganti Kerugian negara/daerah yang diterbitkan pada tahun 2018 adalah sejumlah 56 LHP dengan skor kinerja 100. Nilai IK 1.2.2 ini telah mencapai target yang ditetapkan sejumlah 56 LHP.

Perkembangan capaian IKU 4.2 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11 Perbandingan Capaian IK 1.2.2 – Tahun 2016, 2017 dan 2018

IKU	Uraian	Target IKU			Realisasi dan Skor Capaian IKU		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56	56	56	56 dan 100	56 dan 100	56 dan 100

Perbandingan realisasi IK 1.2.2 pada tahun 2018 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018
1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56	56	56	56	56	56	56	56

3. IK 1.2.3 – Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang

Merupakan penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara yang disampaikan Perwakilan ke Ditama Revbang (d.h.i Direktorat EPP) dengan tembusan Ditama Binbangkum. Bertujuan untuk mengukur ketepatan penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara dengan tepat waktu.

Pencapaian IK ini dalam tahun 2018 adalah 91,07% atau kurang dari target yang ditetapkan sebesar 100% dengan skor 91,07.

Perkembangan capaian IK 1.2.3 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12 Perbandingan Capaian IK 1.2.3 – Tahun 2016, 2017 dan 2018

IKU	Uraian	Target IKU			Realisasi dan Skor Capaian IKU		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	62,50% dan 62,50	67,86% dan 67,86	91,07% dan 91,07

Jumlah laporan pemantauan penyelesaian ganti Kerugian negara/daerah yang diterbitkan pada tahun 2018 adalah sejumlah 56 LHPT Runeg, namun demikian penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah pada Semester I (Triwulan II) Tahun 2018 yang disampaikan tepat waktu kepada Ditama Revbang hanya 23 LHPT Runeg dari yang seharusnya 28 LHPT, hal ini dikarenakan terlambatnya penginputan LHPT dalam aplikasi SIKAD oleh Pemegang Dosir/Pemeriksa dan masih adanya ketidaksesuaian data manual dengan data yang diinput dari tahun-tahun sebelumnya.

Untuk tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan berupaya lebih meningkatkan ketepatan waktu penyampaian LHPT Runeg ke Ditama Revbang dan menyesuaikan jadwal pelaksanaan pemantauan dengan batas waktu yang ditetapkan dalam penyampaian LHPT dan penginputannya dalam aplikasi SIKAD, sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu 100%.

Perbandingan realisasi IK 1.2.3 pada tahun 2018 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018
1.2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%	62,50%	67,86%	91,07%

Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

Strategis ini diukur dengan empat IKU, yaitu IK 2.1.1 - Pemenuhan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan, IK 2.1.2 - Indeks Kepuasan Audittee atas Kinerja Pemeriksa BPK, IK 2.1.3 - Ketetapan Waktu Penyampaian LHP, dan IK 2.1.4 – Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK.

1. IK 2.1.1 – Pemenuhan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan

Quality Control bertujuan untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), kode etik, dan Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) dalam rangka mengendalikan mutu pemeriksaan. *Quality Assurance* dalam pemeriksaan adalah aktivitas reviu atas pengendalian mutu (*quality control*) yang diterapkan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Kegiatan *Quality Assurance* dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan dan hasil pemeriksaan BPK telah memenuhi mutu dan dipersyaratkan sesuai standar pemeriksaan yang berlaku.

Pemenuhan skor atas IK 2.1.1 dilakukan dengan pengisian kuesioner atas kegiatan pemeriksaan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan oleh Pemberi Tugas Pemeriksaan (PTP), Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP), dan Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP).

Untuk tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menargetkan tingkat pemenuhan *Quality Control* sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%, dengan skor 100.

Perkembangan capaian IK 2.1.1 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13 Perbandingan Capaian IK 2.1.1 – Tahun 2016, 2017 dan 2018

IKU	Uraian	Target IKU			Realisasi dan Skor Capaian IKU		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100% dan 100	100% dan 100	100% dan 100

Perbandingan realisasi IK 2.1.1 pada tahun 2017 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018
2.1.1 Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2. IK 2.1.2 – Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK

Sebagai suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK meningkatkan kualitas pemeriksaan melalui penyelenggaraan sistem pengendalian mutu. Pengendalian mutu ini antara lain dilakukan melalui survei untuk mengukur tingkat kepuasan pihak terperiksa atas kinerja tim pemeriksa dalam rangka meningkatkan kualitas pemeriksaan.

Pencapaian atas IK 2.1.2 - Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK untuk tahun 2018 mencapai 4,40 dari target indeks sebesar 4,10 yang ditetapkan dengan skor 105.

Perkembangan capaian IK 2.1.2 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14 Perbandingan Capaian IK 2.1.2 – Tahun 2016, 2017 dan 2018

IKU	Uraian	Target IKU			Realisasi dan Skor Capaian IKU		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,60	3,70	4,10	4,26 dan 105	4,31 dan 105	4,40 dan 105

Sementara itu, perbandingan realisasi tahun 2018 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018
2.1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,60	3,70	4,10	3,6	3,6	4,26	4,31	4,40

3. IK 2.1.3 – Ketepatan Waktu Penyampaian LHP

IKU ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pemeriksaan melalui pengukuran ketepatan waktu penyampaian LHP kepada entitas pemeriksaan/stakeholder berdasarkan peraturan perundang-undangan ataupun program pemeriksaan. Pengukuran IKU ini dilakukan atas jenis pemeriksaan keuangan, PDTT (termasuk Bapol), dan kinerja pada periode tertentu.

Pencapaian IKU ini dalam Tahun 2018 adalah 98,65% atau kurang dari target yang ditetapkan sebesar 100% dengan skor 98,65. Tidak tercapainya IKU ini dikarenakan penyelesaian Hasil Pemeriksaan pada Triwulan II tidak semuanya dapat diselesaikan tepat waktu, yaitu Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah, terlambatnya penyampaian 1 (satu) Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut dikarenakan entitas yang terlambat menyerahkan LK *Unaudited*, terdapat beberapa permasalahan di lapangan pada saat pemeriksaan, serta pertimbangan kehati-hatian dalam penyusunan LHP oleh Tim Pemeriksa.

Perkembangan capaian IK 2.1.3 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15 Perbandingan Capaian IK 2.1.3 – Tahun 2016, 2017 dan 2018

IKU	Uraian	Target IKU			Realisasi dan Skor Capaian IKU		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	65,82% dan 65,82	62,16% dan 62,16	98,65% dan 98,65

Perbandingan realisasi IK 2.1.3 pada tahun 2018 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018
2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	100%	65,82%	62,16%	98,65%

4. IK 2.1.4 – Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK

IKU ini menunjukkan kualitas pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan sesuai dengan SPKN, yang mensyaratkan bahwa jika ada LHP yang digugat dan dinyatakan menang bagi BPK di pengadilan. IKU ini di BPK Perwakilan baru diterapkan pada tahun 2017.

IKU ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya salah saji atau tiada salah saji (*zero defect*) pada LHP, sehingga dapat memitigasi resiko LHP yang digugat dan BPK dinyatakan kalah. Jika ada LHP yang sampai digugat dan BPK dinyatakan kalah, berarti menunjukkan bahwa kualitas LHP itu kurang baik. Namun jika BPK memenangkan tuntutan dari pihak ketiga atas suatu gugatan terhadap LHP, maka berarti LHP tersebut berkualitas dan sudah sesuai dengan SPKN.

Capaian IKU ini dalam Tahun 2018 adalah 100% atau sesuai target yang ditetapkan sebesar 100% dengan skor 100.

Perkembangan capaian IK 2.1.4 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16 Perbandingan Capaian IK 2.1.4 – Tahun 2016, 2017 dan 2018

IKU	Uraian	Target IKU			Realisasi dan Skor Capaian IKU		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
2.1.4 Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK		N/A	100%	100%	N/A	100% dan 100	100% dan 100

Sementara itu, perbandingan realisasi tahun 2018 terhadap Target Kinerja lima tahunan belum tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020, walaupun di tahun 2017 sudah masuk dalam Perjanjian Kinerja pada setiap Perwakilan. Sehingga diharapkan terdapat perubahan terhadap Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020. Namun demikian apabila diperbandingan untuk kurun waktu lima tahunan, maka direncanakan target sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018
2.1.4 Percentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%

Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan

Strategis ini diukur dengan tiga IKU, yaitu IK 3.1.1 – Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK, IK 3.1.2 – Indeks Implementasi Nilai dasar BPK, dan IK 3.1.3 – Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin.

1. IK 3.1.1 – Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK

IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauhmana pemahaman pegawai di BPK Perwakilan dalam mengetahui dan memahami visi, misi dan nilai dasar BPK. Pengukuran dinilai dalam bentuk indeks yang dilaksanakan oleh Dit. PSMK melalui penyebaran kuesioner secara online kepada pegawai di BPK Perwakilan dan pelaksanaannya dilakukan pihak surveyor independen yang ditunjuk dan ditugaskan oleh BPK.

IKU ini merupakan IKU baru yang sebelumnya tidak ada di PK 2016 dan PK 2017, serta belum masuk dalam Renstra BPK dan Renstra BPK Perwakilan Tahun 2016 – 2020.

Capaian IKU ini dalam Tahun 2018 adalah 3,83, dengan skor 76,6, hal tersebut belum sesuai target yang ditetapkan sebesar 5,00.

Perkembangan capaian IK 3.1.1 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17 Perbandingan Capaian IK 3.1.1 – Tahun 2016, 2017 dan 2018

IKU	Uraian	Target IKU			Realisasi dan Skor Capaian IKU		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK	N/A	N/A	5,00	N/A	N/A	3,83 dan 76,6

Perbandingan realisasi tahun 2018 terhadap Target Kinerja lima tahunan belum tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020, IKU ini baru ada di tahun 2018 dalam Perjanjian Kinerja pada setiap Perwakilan. Sehingga diharapkan terdapat perubahan terhadap Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020. Namun demikian apabila diperbandingan untuk kurun waktu lima tahunan, maka direncanakan target sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018
3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK	N/A	N/A	5,00	N/A	N/A	N/A	N/A	3,83

2. IK 3.1.2 – Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauhmana pegawai di BPK Perwakilan dalam mengimplementasikan nilai dasar BPK, yaitu Independensi, Integritas dan Profesional. Pengukuran dinilai dalam bentuk indeks yang dilaksanakan oleh Dit. PSMK melalui penyebaran kuesioner secara online kepada pegawai di BPK Perwakilan dan pihak auditee serta masyarakat umum, yang pelaksanaannya dilakukan pihak surveyor independen yang ditunjuk dan ditugaskan oleh BPK.

IKU ini merupakan IKU baru yang sebelumnya tidak ada di PK 2016 dan PK 2017, serta belum masuk dalam Renstra BPK dan Renstra BPK Perwakilan Tahun 2016 – 2020.

Capaian IKU ini dalam Tahun 2018 adalah 4,47, dengan skor 89,4, hal tersebut belum sesuai target yang ditetapkan sebesar 5,00.

Perkembangan capaian IK 3.1.2 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18 Perbandingan Capaian IK 3.1.2 – Tahun 2016, 2017 dan 2018

IKU	Uraian	Target IKU			Realisasi dan Skor Capaian IKU		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	N/A	N/A	5,00	N/A	N/A	4,47 dan 89,4

Perbandingan realisasi tahun 2018 terhadap Target Kinerja lima tahunan belum tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020, IKU ini baru ada di tahun 2018 dalam Perjanjian Kinerja pada setiap Perwakilan. Sehingga diharapkan terdapat perubahan terhadap Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020. Namun demikian apabila diperbandingan untuk kurun waktu lima tahunan, maka direncanakan target sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018
3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	N/A	N/A	5,00	N/A	N/A	N/A	N/A	4,47

3. IK 3.1.3 – Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin

IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pegawai BPK terhadap kode etik dan peraturan terkait kedisiplinan pegawai. IKU ini merupakan IKU yang baru ada di Tahun 2017 bagi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Capaian IKU ini dalam Tahun 2018 adalah 100% atau sesuai target yang ditetapkan sebesar 100% dengan skor 100.

Perkembangan capaian IK 3.1.2 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19 Perbandingan Capaian IK 3.1.3 – Tahun 2016, 2017 dan 2018

IKU	Uraian	Target IKU			Realisasi dan Skor Capaian IKU		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	N/A	100%	100%	N/A	100% dan 100	100% dan 100

Perbandingan realisasi tahun 2018 terhadap Target Kinerja lima tahunan belum tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020, IKU ini baru ada di tahun 2017 dalam Perjanjian Kinerja pada setiap Perwakilan. Sehingga diharapkan terdapat perubahan terhadap Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020. Namun demikian apabila diperbandingan untuk kurun waktu lima tahunan, maka direncanakan target sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018
3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%

Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan

Strategi ini diukur dengan tujuh IKU, yaitu IK 3.2.1 – Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja, IK 3.2.2 - Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, IK 3.2.3 – Jumlah *Best-Practice* yang disusun, IK 3.2.4 - Tingkat Penerapan *Best-Practice*, IK 3.2.5 - Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja, IK 3.2.6 - Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana, dan IK 3.2.7 - Jumlah *Media Relation* yang Dilaksanakan.

1. IK 3.2.1 – Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas atas kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 431/K/X- XIII.2/9/2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-Unit Pelaksana BPK, maka Perwakilan Provinsi Jawa Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) setiap tahunnya. Selain itu, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat, LAK ini akan dievaluasi oleh Inspektorat Utama secara periodik.

Berdasarkan Nota Dinas Inspektor Utama No. 296/ND/XI/08/2018, tanggal 24 Agustus 2018, perihal: Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dinyatakan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat memperoleh nilai sebesar 76,96 atau dengan kategori "BB" (Sangat Baik) dengan skor 88,89. Dengan demikian, capaian atas IK 3.2.1 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan belum sesuai dengan target Tahun 2018, yaitu "A".

Perkembangan capaian IK 3.2.1 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20 Perbandingan Capaian IK 3.2.1 – Tahun 2016, 2017 dan 2018

IKU	Uraian	Target IKU			Realisasi dan Skor Capaian IKU		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	A	A	A dan 100	A dan 100	BB dan 88,89

Perbandingan realisasi IK 3.2.1 pada tahun 2018 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018
3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	A	A	A	A	A	A	BB

2. IK 3.2.2 – Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Teknologi informasi mendukung ketersediaan informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Upaya untuk meningkatkan dukungan teknologi informasi dilakukan dengan mengintegrasikan sistem, database dan jaringan teknologi informasi yang diprioritaskan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses bisnis dalam organisasi.

Mempertimbangkan manfaat yang akan diperoleh dari pemanfaatan TI dan tingginya biaya untuk membangun infrastruktur TI, maka membudayakan "IT Culture" di lingkungan organisasi merupakan syarat mutlak. Untuk itu, beberapa aplikasi TI dijadikan indikator dalam mengukur capaian IK 3.2.2 yaitu: SISDM, pemanfaatan e-mail, e-drive, SMP, portal BPK dan portal e-Audit.

Pencapaian IKU ini dalam tahun 2018 adalah 82,68% dengan skor 103,36. Capaian ini melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 80%

Perkembangan capaian IK 3.2.2 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21 Perbandingan Capaian IK 3.2.2 – Tahun 2016, 2017 dan 2018

IKU	Uraian	Target IKU			Realisasi dan Skor Capaian IKU		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	80%	80%	79,36% dan 79,36	75,69% dan 94,61	82,68% dan 103,36

Target IK 3.2.2 pada tahun 2018 melebihi target yang ditetapkan. Namun demikian masih ada beberapa hal yang kurang yaitu pemanfaatan portal e-Audit tidak maksimal dikarenakan sebagian besar pemeriksa hanya mengakses portal e-Audit semata-mata untuk menguji manifest dari maskapai penerbangan tertentu. Jenis pengujian ini biasanya hanya dilakukan pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan ataupun Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. Namun demikian untuk pemanfaatan aplikasi SMP dan SIPTL sudah mencapai 100% dimanfaatkan dalam rangka pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Rincian tingkat pemanfaatan TI Tahun 2018 di Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

Layanan Dasar			Layanan Aplikasi Umum		Layanan Aplikasi Pemeriksaan		
e-mail (20%)	e-drive (10%)	Portal (5%)	SISDM (30%)		SMP (15%)	e-audit (15%)	SIPTL (5%)
99,43%	80,84%	100%	99,05%		100%	0,00%	100%
94,20%			99,05%		57,14%		

Perbandingan realisasi IKU 3.2.2 pada tahun 2018 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018
3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	80%	80%	100%	100%	79,36%	75,69%	82,68%

3. IK 3.2.3 – Jumlah *Best-Practice* yang disusun

IK 3.2.3 digunakan untuk mengukur penyusunan jumlah *best-practices* yang telah teruji dalam pelaksanaan tugas pekerjaan pada satker-satker BPK. Namun demikian, untuk tahun 2018, IKU ini baru diukur. Capaian IKU ini dalam Tahun 2018 adalah 0 dengan skor 0 atau belum dapat sesuai target yang ditetapkan sebesar 1.

Sehingga Perkembangan capaian IK 3.2.3 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22 Perbandingan Capaian IK 3.2.3 – Tahun 2016, 2017 dan 2018

IKU	Uraian	Target IKU			Realisasi dan Skor Capaian IKU		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
3.2.3	Jumlah <i>Best-Practice</i> yang disusun	N/A*	N/A*	1	N/A*	N/A*	0 dan 0

*) tidak diukur pencapaiannya karena target tidak ditetapkan

Perbandingan realisasi IKU 3.2.3 pada tahun 2018 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018
3.2.3 Jumlah <i>Best-Practice</i> yang disusun	0	0	1	0	0	N/A*	N/A*	0

*) tidak diukur pencapaiannya karena target tidak ditetapkan

4. IK 3.2.4 – Tingkat Penerapan *Best-Practice*

IK 3.2.4 digunakan untuk mengukur penerapan/implementasi atas *best-practices* yang telah teruji dalam pelaksanaan tugas pekerjaan pada suatu satker BPK, yang diterapkan atau direplikasikan pada satker yang lain dan disesuaikan dengan kondisi di satker yang melaksanakan replikasi tersebut. IKU ini baru diukur pencapaiannya pada tahun 2018.

Capaian IKU ini dalam Tahun 2018 adalah 100% dengan skor 100, hal ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Sehingga Perkembangan capaian IK 3.2.4 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.23 Perbandingan Capaian IK 3.2.4 – Tahun 2016, 2017 dan 2018

IKU	Uraian	Target IKU			Realisasi dan Skor Capaian IKU		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best-Practice</i>	N/A*	N/A*	100%	N/A*	N/A*	100% dan 100

*) tidak diukur pencapaiannya karena target tidak ditetapkan

Perbandingan realisasi IKU 3.2.4 pada tahun 2018 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018
3.2.4 Tingkat Penerapan <i>Best-Practice</i>	0%	0%	100%	0%	0%	N/A*	N/A*	100%

*) tidak diukur pencapaiannya karena target tidak ditetapkan

5. IK 3.2.5 –Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja

IK 3.2.5 digunakan untuk mendorong unit kerja agar menyusun dan menyampaikan laporan bulanan secara tepat waktu. Ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan adalah sesuai dengan POS Perencanaan, yaitu tanggal 10 di bulan berikutnya dan juga untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian LAK Perwakilan Provinsi Jawa Barat secara tepat waktu sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 431/K/X-XIII.2/9/2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-Unit Pelaksana BPK.

Capaian IKU ini dalam Tahun 2018 adalah 100% dengan skor 100, hal ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Sehingga Perkembangan capaian IK 3.2.5 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.24 Perbandingan Capaian IK 3.2.5 – Tahun 2016, 2017 dan 2018

IKU	Uraian	Target IKU			Realisasi dan Skor Capaian IKU		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output	100%	100%	100%	100% dan 100	83,33% dan 83,33	100% dan 100
	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Kinerja	100%	100%		100% dan 100	100% dan 100	

Perbandingan realisasi IK 3.2.5 pada tahun 2018 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018
3.2.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	output: 100%	output: 83,33%	100%

6. IK 3.2.6 – Jumlah Media *Relation* yang Dilaksanakan

Media *relation* dilakukan dengan tujuan untuk mengenalkan tugas, fungsi serta peran BPK kepada *stakeholders* BPK, antara lain para insan media. Media merupakan sarana yang paling efektif untuk mengenalkan BPK kepada masyarakat.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat selama tahun 2018 adalah:

- a. Siaran Pers pada saat Penyerahan LHP sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Penyerahan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA 2017 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Barat (DPRD), Penyerahan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat TA 2017 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dan Penyerahan LHP Kinerja pada Semester II Tahun 2018.
- b. Menyelenggarakan kegiatan Media Workshop pada tanggal 8 November 2018;
- c. TV Talkshow di TVRI Stasiun Jawa barat pada 17 Desember 2018.

Pencapaian IKU ini dalam tahun 2018 adalah 3,90 dengan skor 105 atau melebihi target yang ditetapkan sebanyak 3,00.

Perkembangan capaian IK 3.2.6 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.25 Perbandingan Capaian IK 3.2.6 – Tahun 2016, 2017 dan 2018

IKU	Uraian	Target IKU			Realisasi dan Skor Capaian IKU		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
3.2.6	Jumlah Media <i>Relation</i> yang Dilaksanakan	2	2	3	3,4 dan 105	4,9 dan 105	3,9 dan 105

Perbandingan realisasi IKU 3.2.6 pada tahun 2018 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018
3.2.6 Jumlah Media <i>Relation</i> yang Dilaksanakan	2	2	3	2	2	3,4	4,9	3,9

7. IK 3.2.7 – Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kerja merupakan fasilitas yang secara langsung dan tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan kerja pegawai dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Tersedianya fasilitas kerja sesuai dengan standar sarana dan prasarana kerja merupakan pendorong tercapainya standar kinerja yang diharapkan.

IKU ini bertujuan untuk menilai rata-rata persentase tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2018, Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah mencapai pemenuhan standar sarana dan prasarana kerja sebesar 96,65% dengan skor 101,73 atau melebihi dari target 95%.

Adapun perkembangan capaian IK 3.2.7 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.26 Perbandingan Capaian IK 3.2.7 – Tahun 2016, 2017 dan 2018

IKU	Uraian	Target IKU			Realisasi dan Skor Capaian IKU		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
3.2.7	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	2	2	3	3,4 dan 105	4,9 dan 105	3,9 dan 105

Perbandingan realisasi IKU 3.2.7 pada tahun 2018 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018
3.2.7 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	95%	95%	96%	96%	97,12%	97,12%	96,65%

Startegi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan

Sasaran Strategis ini diukur dengan dua IKU, yaitu IK 3.3.1 – Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa, dan IK 3.3.2 - Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa).

1. IK 3.3.1 – Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa

Setiap pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), standar jam pelatihan yang harus dipenuhi setiap pemeriksa per tahunnya adalah 40 jam. IKU ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan latihan bagi pegawai pemeriksa untuk memenuhi standar pendidikan berkelanjutan yang diatur dalam SPKN.

Untuk tahun 2018, realisasi IK 3.3.1 adalah sebesar 89,26% dengan skor kinerja 89,26. Nilai IKU ini belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Kondisi tersebut disebabkan keterbatasan jumlah pemeriksa di Perwakilan yang tidak sebanding dengan tingginya frekuensi pemeriksaan. Hal tersebut menyebabkan jadwal diklat berbarengan dengan tugas pemeriksaan yang harus segera diselesaikan.

Adapun upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi tidak tercapainya jam diklat pemeriksa dengan menyelenggarakan diklat teknis (diklat pemeriksaan) yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan, yaitu:

- a. Diklat Prosedur Analis, Materialitas, dan Penentuan Sampel Pemeriksaan Laporan Keuangan (tanggal 5 s.d. 7 Februari 2018);
- b. Diklat Penentuan Area kunci (tanggal 18 s.d. 19 Oktober 2018); dan
- c. Diklat Perhitungan Kerugian Negara/Daerah (tanggal 4 s.d. 7 Desember 2018).

Namun demikian, sampai dengan akhir tahun 2018, target 100% pemeriksa memenuhi jam diklat tidak tercapai, dari 121 orang pemeriksa, hanya 108 orang pemeriksa yang memenuhi target 40 JP. Untuk itu, kedepannya akan dilakukan perencanaan yang lebih baik terkait dengan pelaksanaan diklat yang disesuaikan dengan waktu pemeriksaan.

Perkembangan capaian IK 3.3.1 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.27 Perbandingan Capaian IK 3.3.1 – Tahun 2016, 2017 dan 2018

IKU	Uraian	Target IKU			Realisasi dan Skor Capaian IKU		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	85,45% dan 85,45	88,52% dan 88,52	89,26% dan 89,26

Untuk tahun ke depan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan berusaha untuk meningkatkan pencapaiannya menjadi 100%. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan cara memberikan kesempatan diklat kepada seluruh pemeriksa minimal 40 jam dalam satu tahun. Salah satu upaya adalah melaksanakan diklat sebanyak 3(tiga) diklat yang diselenggarakan di Perwakilan dengan persetujuan Pusdiklat.

Perbandingan realisasi IK 3.3.1 pada tahun 2018 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018
3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%	100%	85,45%	88,52%	89,26%

2. IK 3.3.2 – Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)

Untuk memenuhi tujuan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di berbagai lini organisasi BPK, setiap pegawai dipersyaratkan untuk diberikan pendidikan/pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh pegawai yang bersangkutan. Sebagaimana PFP (pemeriksa), pegawai non pemeriksa baik staf maupun pejabat struktural dipersyaratkan untuk memelihara kompetensi sesuai bidang yang diemban.

Untuk tahun 2018, capaian realisasi IK 3.3.2 adalah sebesar 100% dengan skor kinerja 100. Nilai IKU ini mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%.

Adapun upaya yang sudah dilakukan untuk tercapainya jam diklat bagi pegawai di Sekretariat (Non Pemeriksa) dengan menyelenggarakan diklat teknis yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan, yaitu: Diklat Kesekretariatan dan Kearsipan (tanggal 19 s.d. 21 September 2018)

Perkembangan capaian IK 3.3.2 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.28 Perbandingan Capaian IK 3.3.2 – Tahun 2016, 2017 dan 2018

IKU	Uraian	Target IKU			Realisasi dan Skor Capaian IKU		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	90%	100%	62,90% dan 69,89	87,27% dan 96,97	100% dan 100

Perbandingan realisasi IKU 3.3.2 pada tahun 2018 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018
3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	90%	100%	92%	93%	62,90%	87,27%	100%

Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan

Pelaksanaan seluruh tugas di BPK harus didukung oleh sumber daya keuangan negara. Oleh karena itu, anggaran pelaksanaan kegiatan harus dimanfaatkan secara optimal dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dilakukan dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja sehingga memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan memberikan manfaat kepada organisasi.

Melalui Strategi ini, BPK berupaya untuk meningkatkan pertanggungjawaban anggaran dan juga pemanfaatan anggaran secara optimal dalam rangka peningkatan kinerja BPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Strategi ini diukur dengan satu IKU, yaitu IK 3.4.1 – Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

1. IK 3.4.1- Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

Tujuan IK 3.4.1 adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja. Tingkat kinerja atas aspek implementasi berdasarkan PMK 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dinilai dari empat indikator, yaitu: penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, dan efisiensi.

Pencapaian IKU ini pada Tahun 2018 mencapai 82,76% dengan skor 97,36 atau kurang dari target yang ditetapkan sebesar 85%. Capaian Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran tersebut berdasarkan Hasil Penilaian dari Biro Keuangan, sebagai berikut:

Penilaian Biro Keuangan atas IK 3.4.1 – Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran				
Penyerapan Anggaran	Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi	Pencapaian Keluaran	Efisiensi	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran
95,43%	70,20%	99,49%	61%	82,76%

Perkembangan capaian IK 3.4.1 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.29 Perbandingan Capaian IK 3.4.1 – Tahun 2016, 2017 dan 2018

IKU	Uraian	Target IKU			Realisasi dan Skor Capaian IKU		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	80%	82%	85%	91,40% dan 105	86,40% dan 105	82,76% dan 97,36

Perbandingan realisasi IK 3.4.1 pada tahun 2018 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018
3.4.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	80%	82%	85%	85%	90%	91,40%	86,40%	82,76%

C. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Anggaran berdasarkan Laporan Realisasi DIPA

Realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan dalam mencapai kinerja tahun 2018 pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Laporan Realisasi DIPA Tahun 2018, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.30 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran

Program/Kegiatan/Keluaran/SubKeluaran	Output Keluaran (volume)			Anggaran (Rp)			%
	Target	Realisasi	Satuan	Rencana	Revisi	Realisasi	
1 LHP BPK Perwakilan Jawa Barat	71	72	LHP	17.611.928.000,00	17.119.433.000,00	16.473.895.766,00	96,23%
a. LHP Keuangan	26	26	LHP	11.654.869.000,00	10.706.744.000,00	10.285.086.152,00	96,06%
b. LHP Kinerja	9	10	LHP	3.559.986.000,00	3.500.586.000,00	3.325.512.582,00	95,00%
c. LHP DTT (No Bapol)	8	8	LHP	1.842.251.000,00	2.326.878.000,00	2.277.687.000,00	97,89%
d. LHP DTT Bapol	28	28	LHP	554.822.000,00	585.225.000,00	585.610.032,00	100,07%
2 LHP KAP untuk dan atas nama BPK	2	2	LHP	1.813.546.000,00	1.813.546.000,00	1.405.894.000,00	77,52%
3 Laporan Pemantauan BPK	112	112	LHP	1.135.512.000,00	1.132.326.000,00	965.430.324,00	85,26%
a. Kerugian Daerah	56	56	LHP	867.392.000,00	883.735.000,00	720.492.724,00	81,53%
b. TLRHP	56	56	LHP	268.120.000,00	248.591.000,00	244.937.600,00	98,53%
4 Rumusan Bahan Pendapat	1	1	Rumusan Bahan	23.860.000,00	21.540.000,00	20.772.097,00	96,43%
5 Layanan Administrasi Pemeriksaan	12	12	Laporan	1.022.703.000,00	1.378.473.000,00	1.363.055.315,00	98,88%
6 Sumbangan IHPS	2	2	Sumbangan IHPS	177.900.000,00	161.210.000,00	160.134.120,00	99,33%
7 Laporan Profil Entitas	2	2	Laporan	53.423.000,00	48.111.000,00	45.141.702,00	93,83%
8 Layanan Sekretariat Perwakilan	20	20	Laporan	1.909.619.000,00	2.070.666.000,00	2.026.735.028,00	97,88%
a. Layanan Hukum Perwakilan	4	4	Laporan	277.502.000,00	283.732.000,00	278.461.630,00	98,14%
b. Layanan Kehumasan dan TU Perwakilan	4	4	Laporan	615.345.000,00	652.252.000,00	647.096.279,00	99,21%
c. Layanan SDM Perwakilan	4	4	Laporan	329.755.000,00	385.525.000,00	384.668.591,00	99,78%
d. Layanan Keuangan Perwakilan	4	4	Laporan	274.958.000,00	321.198.000,00	299.558.139,00	93,26%
e. Layanan Umum Perwakilan	4	4	Laporan	412.059.000,00	427.959.000,00	416.950.389,00	97,43%
9 Layanan Internal Overhead	1	1	Laporan	70.971.000,00	70.971.000,00	70.770.000,00	99,72%
10 Layanan Perkantoran	12	12	Layanan	17.908.033.000,00	17.714.541.000,00	17.538.381.104,00	99,01%
a. Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan				334.779.000,00	334.779.000,00	334.309.005,00	99,86%
b. Layanan Perkantoran Bidang SDM				12.397.934.000,00	12.204.442.000,00	12.113.934.510,00	99,26%
c. Layanan Perkantoran Bidang Keuangan				283.440.000,00	283.440.000,00	283.440.000,00	100,00%
d. Layanan Perkantoran Bidang Umum				4.891.880.000,00	4.891.880.000,00	4.806.697.589,00	98,26%
Total	235	236		41.727.495.000,00	41.530.817.000,00	40.070.209.456,00	96,48%

2. Realisasi Anggaran berdasarkan Realisasi Kinerja

Realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan dalam mencapai kinerja tahun 2018 pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Laporan Kinerja Tahun 2018, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keterangan
IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Lanjut Tindak Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan	65%	68,50%	268.120.000,00 revisi: 248.591.000,00	244.937.600,00	
IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	6.400.000,00	5.422.550,00	Anggaran Laporan Pemantauan atas Penanganan Hasil Pemeriksaan BPK
IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	102%	39.120.000,00 revisi: 49.140.000,00	48.853.000,00	Anggaran Bantuan Hukum dan Pemberian Keterangan Ahli
IKU 1.4	Jumlah Pendapat Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	23.860.000,00 revisi: 21.540.000,00	20.772.097,00	
IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90%	100%	5.402.237.000,00 revisi: 5.827.464.000,00	5.603.199.582,00	Pemeriksaan Kinerja: 10 entitas; Pemeriksaan DTT Non Banparpol: 8 entitas.
IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	20%	21,74%	3.559.986.000,00 revisi: 3.500.586.000,00	3.325.512.582,00	10 LHP Kinerja
IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	80%	100%	18.870.652.000,00 revisi: 18.347.754.000,00	17.294.179.734,00	Pemeriksaan Keuangan: 28 LHP; Pemeriksaan Kinerja: 10 LHP; Pemeriksaan DTT Non Banparpol: 8 LHP.

Indikator Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keterangan
IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	268.120.000,00 revisi: 248.591.000,00	244.937.600,00	
IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56	56			
IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	91,07%	867.392.000,00 revisi: 883.735.000,00	720.492.724,00	
IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	100%	19.425.474.000,00 revisi: 18.932.979.000,00	17.879.789.766,00	74 LHP
IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,10	4,40	N/A	N/A	
IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	98,65%	19.425.474.000,00 revisi: 18.932.979.000,00	17.879.789.766,00	74 LHP
IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%	100%	N/A	N/A	
IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5,00	3,83	N/A	N/A	
IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,47	N/A	N/A	
IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	N/A	N/A	
IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	BB	N/A	N/A	
IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	82,68%	52.950.000,00	52.504.645,00	
IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	1	0	N/A	N/A	

Indikator Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keterangan
IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%	100%	N/A	N/A	
IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%	132.142.000,00	115.812.793,00	
IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	96,65	4.962.851.000,00	4.877.467.589,00	
IK 3.2.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	3	3,90	72.600.000,00	71.750.400,00	
IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	89,26	101.047.000,00	100.618.218,00	Anggaran tersebut untuk melakukan pengurusan, koordinasi dan konsultasi baik ke Badan Diklat dan Biro SDM, sedangkan anggaran pelaksanaan diklat berasal dari Badan Diklat
IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	100%			
IK 3.4.1	Tingkat Implementasi Anggaran Kinerja	85%	82,76	558.398.000,00 revisi: 604.638.000,00	582.998.139,00	

N/A : Indikator Kinerja tidak dapat dipetakan/identifikasi ke dalam anggaran dan realisasinya.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat ini merupakan perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja yang dicapai oleh Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang memuat baik keberhasilan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan maupun belum tercapainya beberapa target kinerja yang telah ditetapkan dalam upaya mencapai visi BPK, yaitu menjadi lembaga pemeriksa keuangan Negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan Negara yang akuntabel dan transparan.

Pencapaian skor kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk Tahun 2018 adalah 97,70, dengan pencapaian sesuai target atau melebihi target untuk 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja (IKU/IK) yaitu: Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan; Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH; Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli; Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang; Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan; Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP; Tingkat Evaluasi LHP; Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan; Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara; Pemenuhan *Quality Control* dan *Quality Assurance* Pemeriksaan; Indeks Kepuasan Auditoree atas Kinerja Pemeriksa BPK; Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK; Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin; Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi; Tingkat Penerapan *Best Practice*; Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja; Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana; Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan; dan Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa).

Selain IKU yang pencapaian sesuai target atau melebihi target, terdapat 8 (delapan) IKU yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu:

1. IK 1.2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang
2. IK 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP;
3. IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK;
4. IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
5. IK 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja;
6. IK 3.2.3 Jumlah *Best Practice* yang Disusun;
7. IK 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa; dan
8. IK 3.4.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran.

Hal tersebut mempengaruhi capaian target kinerja secara keseluruhan pada Tahun 2018 yang menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Permasalahan dan kendala utama yang menjadi penyebab tidak tercapainya beberapa target IKU BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yaitu :

1. Jumlah laporan pemantauan penyelesaian ganti Kerugian negara/daerah yang diterbitkan pada tahun 2018 adalah sejumlah 56 LHPt Runeg. Penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah pada Semester I (Triwulan II) Tahun 2018 yang disampaikan tepat waktu kepada Ditama Revbang hanya 23 LHPt Runeg dari yang seharusnya 28 LHPt Runeg, hal ini dikarenakan terlambatnya penginputan LHPt dalam aplikasi SIKAD oleh Pemegang Dosir/Pemeriksa dan masih adanya ketidaksesuaian data manual dengan data yang diinput dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk Semester II, LHPt Runeg dapat diinput seluruhnya (28 LHPt) dalam aplikasi SIKAD oleh Pemegang Dosir/Pemeriksa.
2. Ketepatan Waktu Penyampaian LHP belum sesuai target, dikarenakan penyelesaian Hasil Pemeriksaan pada Triwulan II tidak semuanya dapat diselesaikan tepat waktu, yaitu Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah, terlambatnya penyampaian 1 (satu) Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut yang disebabkan entitas terlambat menyerahkan LK *Unaudited*, dan juga terdapat beberapa permasalahan di lapangan pada saat pemeriksaan, serta adanya pertimbangan kehati-hatian dalam penyusunan LHP oleh Tim Pemeriksa.
3. Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK dan Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK, menurut hasil survey yang dilakukan oleh Dit. PSMK melalui surveyor, masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan pegawai di BPK Perwakilan mengenai Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK. Selain itu dalam implementasinya dilapangan, masih belum dapat diimplementasikan sepenuhnya oleh pegawai, karena penilaian tersebut adalah berdasarkan hasil survei kepada pihak eksternal. Ke depannya akan lebih banyak disampaikan pada saat pengarahan Pimpinan/Kalan kepada pegawai dan dalam rapat-rapat internal.
4. Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja belum sesuai dengan target yang ditetapkan dan menurun dari tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi Itama atas Laporan Akuntabilitas Kinerja, terdapat beberapa catatan dan penilaian evaluasi bahwa laporan yang dibuat belum memenuhi beberapa kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta belum terdokumentasikannya dalam proses evaluasi kinerja.
5. Jumlah *Best Practice* yang Disusun, belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tahun 2018, BPK perwakilan belum dapat menyampaikan kepada Dit. PSMK mengenai *Best Practice* yang ada dan disusun di Perwakilan, hal ini karena best practice yang mungkin ada belum terdokumentasikan dengan baik dan belum dibuat pedoman atau SOP dalam pelaksanaannya.
6. Jadwal diklat sering bersamaan waktunya dengan tugas pemeriksaan ataupun tugas kesekretariatan yang harus segera diselesaikan, serta penawaran jadwal diklat kesekretariatan yang tidak pas, sering kali jadwal diklat untuk pemeriksa yang ditawarkan pada semester I dan semester II, walaupun di perwakilan sendiri telah melaksanakan 3 (tiga) diklat teknis pemeriksaan di Perwakilan, yaitu 1 (satu) diklat pada semester I dan 2 (dua) diklat pada

semester II, namun hal tersebut ternyata belum dapat memenuhi target untuk seluruh pemeriksa 40 JP. Pemeriksa yang belum mencukupi jam diklatnya pada saat pelaksanaan diklat di perwakilan, yang bersangkutan disaat yang bersamaan sedang melaksanakan tugas pemeriksaan ataupun tugas lainnya.

7. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh Biro Keuangan, walaupun penyerapan anggaran cukup besar 95,43% dan pencapaian keluaran 99,49%, namun konsistensi antara perencanaan dan implementasi belum cukup baik dikarenakan adanya beberapa kali revisi anggaran dalam pelaksanaannya, selain itu tingkat efisiensinya juga masih kurang baik dengan tingkat efisiensi anggaran 61%.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat di masa yang akan datang akan melakukan beberapa upaya untuk lebih meningkatkan capaian target yang telah ditetapkan adalah dengan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya dalam rangka perbaikan pengelolaan kinerja, meningkatkan SDM pengelola kinerja, dan perbaikan dalam perencanaan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Skor
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Percentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%	68,50%	105
	IKU 1.2	Percentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	102%	102
	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	100
Strategi 1.1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90%	100%	105
	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	20%	21,74%	105
	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	80%	100%	105
Strategi 1.2. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100
	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56	56	100
	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	91,07%	91,07
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan Quality Control dan Quality Assurance Pemeriksaan	100%	100%	100
	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,10	4,40	105
	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	98,65%	98,65
	IK 2.1.4	Percentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%	100%	100
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5,00	3,83	76,60
	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,47	89,40
	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Skor
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	BB	88,89
	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	82,68%	103,36
	IK 3.2.3	Jumlah Best Practice yang Disusun	1	0	0
	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan Best Practice	100%	100%	100
	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%	100
	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	96,65	101,73
	IK 3.2.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	3	3,90	105
Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.3.1	Percentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	89,26	89,26
	IK 3.3.2	Percentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	100%	100
Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	85%	82,76	97,36

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2018 : Rp41.727.495.000,00

Revisi Anggaran (Revisi VIII) BPK RI TA 2018 : Rp41.530.817.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2018 : Rp40.070.209.456,00



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arman Syifa
Jabatan : Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat

selanjutnya disebut pihak pertama

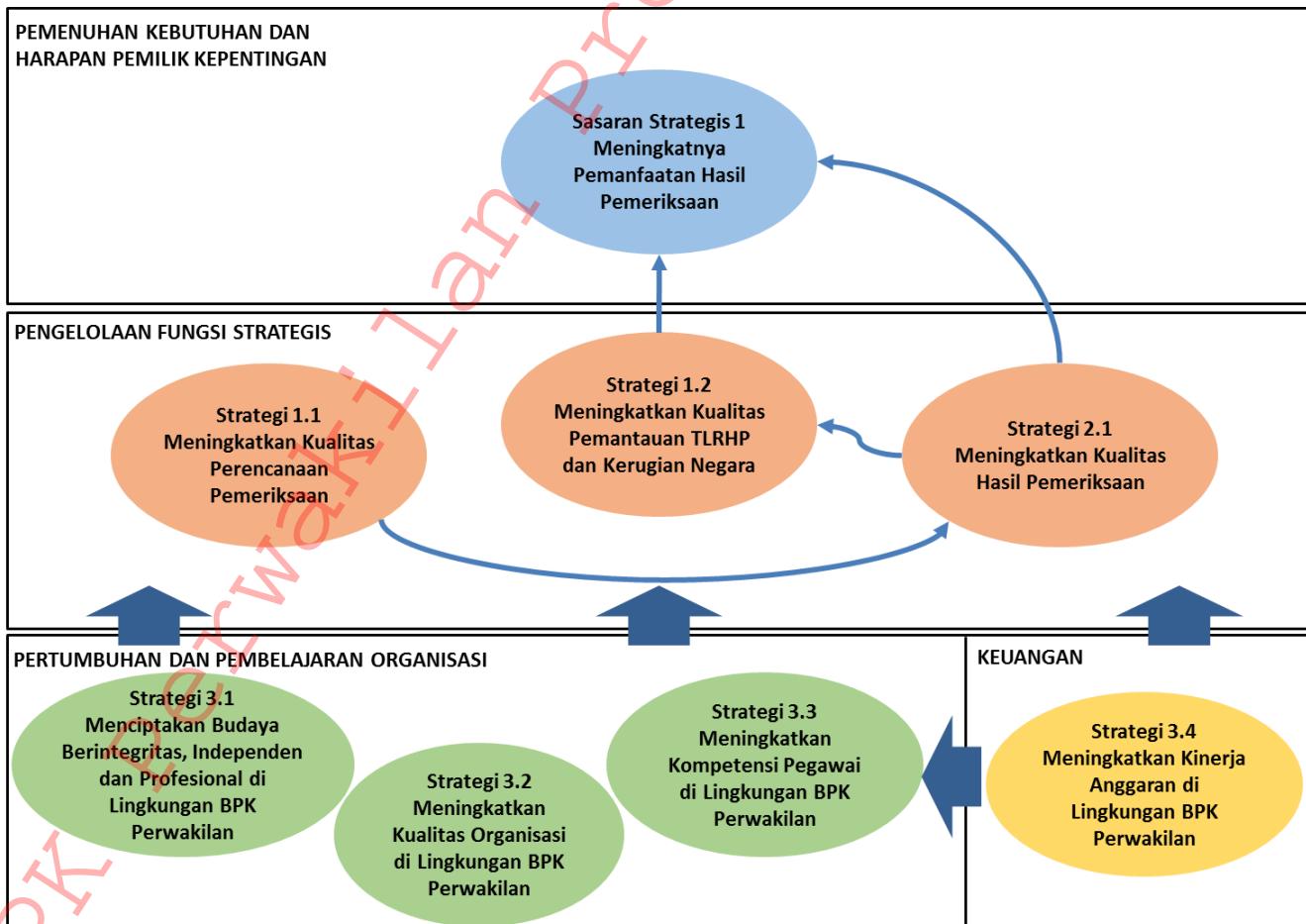
Nama : Bambang Pamungkas
Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara V

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

PETA STRATEGI



INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2018

Strategi	Indikator Kinerja		Target
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH	100%
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%
	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1
Strategi 1.1 - Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90%
	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	20%
	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	80%
Strategi 1.2 - Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56
	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%
Strategi 2.1 - Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%
	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,1
	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
	IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%
Strategi 3.1 - Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5,0
	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0
	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%
Strategi 3.2 - Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A
	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%
	IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	1
	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%
	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%
	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%
Strategi 3.3 - Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%
	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%
Strategi 3.4 - Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	85%

Kegiatan	Anggaran
Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	Rp41.727.495.000,00

Jakarta, 23 April 2018

TORTAMA KN V

Dr. Bambang Pamungkas, M.B.A., Ak., CA.

KEPALA PERWAKILAN
PROVINSI JAWA BARAT

Arman Syifa, S.S.T., M.Acc., Ak.